

Hikmah Ramadan

Menguatkan Pilar-pilar Keluarga Sakinah

Warsiti SKp MKep Sp Mat

PANDEMI Covid-19 membawa pengaruh pada semua aspek hidup manusia, dari masalah kesehatan (fisik), psikologi, pendidikan, ekonomi, sosial, sampai tata cara peribadatan. Pandemi juga memunculkan permasalahan baru dalam keluarga. Adaptasi baru terhadap sistem kerja *work from home* (WFH), orangtua harus menggantikan peran guru untuk mengajar dan mendampingi anak di rumah, karena model pembelajaran Belajar Dari Rumah (BDR), sampai pada persoalan tanggungjawab domestik.

Tak sedikit keluarga pada masa pandemi ini kehilangan pekerjaan, yang menyebabkan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok keluarga dan berujung pada pertengkaran dalam keluarga, konflik suami istri, sampai perceraian, bahkan bertindak di luar nalar sehat melanggar hukum, seperti mencuri untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Di sisi lain banyak keluarga yang mampu secara ekonomi (tidak terdampak), karena suami istri harus bekerja/ meski bekerja dari rumah, muncul masalah baru berkaitan tanggungjawab domestik, seperti memasak, membersihkan rumah, mencuci pakaian, sampai ke problem pengasuhan anak dan pendampingan anak belajar yang selama ini sepenuhnya diserahkan ke sekolah atau di *daycare*. Suami merasa semua tugas itu tanggungjawab perempuan/istri, yang pada akhirnya istri (perempuan) harus mengerjakan tugas-tugas itu di samping juga harus bekerja (*double burden*).

Fenomena diskriminasi terhadap perempuan di atas mungkin juga dipicu kian meluasnya paham keagamaan dalam masyarakat yang cenderung memahami ayat-ayat Alquran dan Sunnah secara tekstual, mengamalkan ajaran Islam seperti amalan Rasul dan Sahabat Nabi, tanpa mempertimbangkan kondisi dan tuntutan kekinian (kontektual), sehingga cenderung sempit, kaku, dan tidak memberikan solusi yang sejalan dengan tujuan syariah terhadap isu-isu yang berkembang, khususnya isu tentang perempuan dan perlindungan anak. Paham ini memengaruhi persepsi masyarakat (termasuk suami) tentang peran perempuan/istri.

Ramadan ini bulan madrasah bagi kita untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah dengan menjadikan Ramadan sarana dan momentum istimewa untuk bermu-



hasabah terhadap hidup dan kehidupan kita. Melalui Ramadan juga penting untuk menguatkan ketahanan keluarga, karena hal ini sangat menentukan dan berpengaruh dalam membangun mental pribadi muslim yang kokoh. Ketika keluarga dengan bantulan iman yang kuat maka dalam menghadapi pandemi global ini akan sabar, ikhlas dan tawakal menerima musibah.

Mengambil hikmah Pandemi Covid-19 di bulan Ramadan, menjadikan kita lebih banyak punya waktu bersama anggota keluarga (kuantitas dan kualitas). Keluarga bisa menciptakan suasana Ramadan indah di rumah. Peran orangtua (ayah & Ibu) menjadi sangat strategi dalam menciptakan suasana keluarga yang menyenangkan dan menenteramkan, saling mencintai, saling menyayangi dan menghargai di antara anggota keluarga (QS Ar-Rum : 21). Orangtua harus kreatif dalam mengemas kegiatan-kegiatan yang tidak membosankan di rumah. Kegiatan selingan di antara tugas mendampingi anak belajar online di rumah yang menggembirakan, seperti jalan pagi bersama, bersepeda, berkebun, memasak untuk buka bersama dan berkebun.

Selain itu yang tak kalah penting adalah pembinaan agama, terutama penguatan iman sangatlah penting pada Ramadan ini. Mbersamai anak untuk salat 5 waktu berjemaah (yang sebelum pandemi mungkin hanya Isya dan Subuh), yang dilanjutkan dengan nasehat nasehat agama oleh orangtua, tadarus bersama, sahur bersama dan buka bersama di rumah. Suasana itu akan kian meningkatkan intensitas komunikasi suami istri, komunikasi orangtua dengan anak yang mungkin tidak mudah bisa kita temukan sebelumnya. Orangtua adalah penentu dan pemegang kendali dalam pembentukan spiritual anak menuju terwujudnya generasi yang salih dan *qurrata alyun*. Beberapa cara yang bisa diajarkan untuk pembentukan spiritual anak: membimbing ibadah dan berzikir, membiasakan dengan *kalimah toyyibah*, mengajarkan Alquran, membantu anak dalam merumuskan misi hidupnya, membimbing anak untuk senantiasa bersyukur atas nikmat dan karunia yang diberikan Allah dan membina akhlak anak dengan *akhlaq mahmudah* (akhlaq yang baik) dengan memberi keteladanan. (*)-f

Warsiti SKp MKep SpMat,
Rektor UNISA Yogyakarta.



KR-Antara/Hendra Nurdijansyah

TOLAK BUS AKAP: Calon penumpang berjalan menuju bus di Terminal Giwangan, Yogyakarta, Rabu (5/5). Aktivitas penumpang bus di Terminal Giwangan pada H-1 penerapan larangan mudik Idul Fitri 2021 terpantau sepi dan terminal tersebut tidak menerima kedatangan bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) mulai Kamis (6/5).

KOMINFO PASTIKAN JARINGAN KOMUNIKASI LANCAR 'Lebaran Digital' Gantikan Mudik

JAKARTA (KR) - Pemerintah terus berjuang untuk menekan angka kasus Covid-19 di Indonesia, salah satu upaya tersebut melalui kebijakan peniadaan aktivitas mudik menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah yang akan dimulai pada 6 Mei 2021.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudik atau melakukan silaturahmi fisik ke kampung halaman saat merayakan Idul Fitri 1442 H. Sebagai gantinya, Menkominfo mengajak silaturahmi secara virtual melalui ruang digital yang saat ini sudah marak dipergunakan dalam berbagai kesempatan.

"Kita canangkan bersama-sama melakukan Lebaran tahun ini sebagai Lebaran Digital. Lebaran Digital itu keren," ajaknya dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) secara virtual dari Media Center Kementerian Kominfo, Jakarta, Rabu (5/5).

Menurut Menkominfo, silaturahmi

secara virtual melalui aplikasi tidak akan mengurangi makna silaturahmi yang sebenarnya. Masyarakat tetap mampu menjalin komunikasi yang efektif dengan para sanak saudara yang berada nun jauh di sana dengan gawainya. "Merayakan acara hari besar hari Lebaran nanti secara virtual tetap meriah. Dalam keluarga sendiri dengan berkomunikasi dengan memanfaatkan teknologi yang ada," katanya.

Dalam mewujudkan Lebaran Digital, Menkominfo menyatakan Kementerian Kominfo akan memastikan jaringan telekomunikasi berkualitas dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di berbagai wilayah. "Hal ini penting, demi kelancaran proses Lebaran Digital yang menjadi pilih-

an perayaan hari raya tahun ini," tandasnya.

Dengan menggandeng sejumlah operator layanan telekomunikasi seluler, Kementerian Kominfo akan menyediakan trafik paket data (bandwidth) yang sangat besar. Semua itu, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tengah melakukan Lebaran Virtual melalui aplikasi-aplikasi daring yang ada.

Menkominfo menyebutkan peniadaan mudik menjadi upaya tegas dan tepat Pemerintah untuk memastikan Indonesia segera beranjak dari pandemi. "Peniadaan mudik oleh Pemerintah bertujuan untuk memastikan bahwa Indonesia berhasil menanganai pandemi Covid-19, untuk menurunkan serendah-rendahnya penyebaran Covid-19," jelasnya.

Johnny G Plate berharap masyarakat yang menjalankan ibadah puasa dan akan menyambut Hari Raya Idul Fitri dengan tidak mudik membawa berkah bagi Indonesia dalam menyelesaikan pandemi Covid-19. (Ati)-f

JUDICIAL REVIEW TENTANG UU KPK Meski Dikabulkan, Timbulkan Persoalan Baru

YOGYA (KR) - Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai *the guardian of constitution* (pengawal konstitusi) seharusnya mengambil peran strategis menjaga spirit reformasi dengan menjaga independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, MK juga perlu mengoreksi secara jernih regulasi yang mereduksi kekuasaan dan independensi KPK. Namun hal ini justru tidak tampak dalam keputusan yang dibacakan.

Hal itu disampaikan juru bicara Tim UII Eko Riyadi SH MH saat membacakan kesimpulan dan sikap Sivitas Akademika UII dalam konferensi pers di Kampus I UII Jalan Cik Ditiro, Rabu (5/5). Sebagaimana diketahui, Kamis (7/11/2019) UII mendaftarkan berkas permohonan *Judicial Review* Undang-Undang No 19/2019 tentang perubahan UU No 30/2002 tentang KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sebagai pemohon antara lain Fathul Wahid PhD, Dekan Fakultas Hukum UII, Dr

Abdul Jamil, Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PusHAM) UII Eko Riyadi, SH MH, Direktur Pusat Studi Kejahatan Ekonomi (PSKE) Fakultas Hukum UII Ari Wibowo MH dan Dosen Fakultas Hukum UII Dr Mahrus Ali. Sementara sebagai Kuasa Hukum pemohon antara lain Anang Zubaidy SH MH, Dr Nurjihad, Dr M Arif Setiawan, Ahmad Khairun MHum MKn dan Wahyu Priyanka Nata Permana MH.

MK menolak permohonan pengujian formil UU No 19/2019 yang diajukan UII. "Meski 90% pengujian materiil dikabulkan, tetapi secara kualitatif ada hal-hal yang perlu disikapi karena menimbulkan persoalan baru," tandas Rektor UII Prof Fathul Wahid PhD.

Fathul menyebutkan permohonan judicial review atas UU No 19/2019 merupakan ikhtiar sivitas akademika UII memastikan hukum berjalan, bekerja dan diformulasikan dengan nalar hukum dan bukan kekuasaan. (Fsy/Ful)-f

Penyuap Mantan Mensos Dihukum 4 Tahun

JAKARTA (KR) - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis hukuman kepada Direktur Utama PT Tigapilar Agro Utama Ardian Iskandar Maddanatja dengan hukuman empat tahun penjara ditambah denda Rp 100 juta subsidi empat bulan kurungan. Pasalnya, terdakwa terbukti menyuap mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara senilai Rp 1,95 miliar terkait penunjukan perusahaan penyedia bansos sembako Covid-19.

"Majelis hakim mengadili, menyatakan terdakwa Ardian Iskandar Maddanatja terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif pertama. Karena itu, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama empat tahun ditambah denda sebesar Rp 100 juta dengan ketentuan bi-

la denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama empat bulan," kata ketua majelis hakim Rianto Adam Ponto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (5/5).

Saat membaca amar putusan, ketua majelis hakim menyebutkan, Ardian terbukti melakukan perbuatan berdasarkan dakwaan pertama dari pasal 5 ayat 1 huruf b UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat 1 KUHP. Untuk itu, vonis yang dijatuhkannya sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK yakni empat tahun penjara ditambah denda Rp 100 juta subsidi empat bulan kurungan.

Sebelum menjatuhkan vonis, majelis hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan. Untuk hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak men-

dukung program pemerintah dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa terkait bansos sembako untuk penanganan dampak Covid-19.

"Sedangkan hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa bersikap sopan selama persidangan, terdakwa menyelesaikan tanggung jawab keluarga," ungkap ketua majelis hakim.

Dalam sidang majelis hakim terdiri, ketua majelis hakim Rianto Adam Ponto, hakim anggota Yusuf Pranowo dan Joko Soebagyo juga menolak permohonan Ardian untuk menjadi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum (*justice collaborator*). Pasalnya, terdakwa tidak mengakui pemberian komitmen dalam pengadilan bansos sembako tersebut. (Ful)-f



KR-Antara/Maulana Surya

KAMPANYE TIDAK MUDIK: Relawan membawa poster bertuliskan 'Terima Kasih Anda Tidak Mudik' saat aksi di Jalan Slamet Riyadi, Solo, Jawa Tengah, Rabu (5/5). Aksi tersebut sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah yang tidak mudik di Solo pada Idul Fitri 2021 dan mengimbau masyarakat agar tetap waspada Covid-19 dengan menjalankan protokol kesehatan ketika beraktivitas.

JIKA ADA KASUS COVID-19 DI LINGKUNGAN Muhammadiyah Ajak Salat Id di Rumah Saja

YOGYA (KR) - Umat Islam khususnya warga Persyarikatan Muhammadiyah dapat melakukan Salat Idul Fitri di rumah saja, bila di lingkungan tinggal ada kasus penularan Covid-19. Jika tidak ada kasus, Salat Idul Fitri bisa dilaksanakan di lapangan kecil atau tempat terbuka di sekitar tempat tinggal dengan jumlah jamaah yang tidak membawa kerumunan besar.

Ketua Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) PP Muhammadiyah Agus Samsudin mengemukakan hal tersebut dalam pertemuan pers Rabu (5/5) sore. Dalam pertemuan itu disampaikan laporan kinerja MCCC selama pandemi Covid-19 berlangsung sejak Maret 2020. Protokol kesehatan 5M disebut Agus hendaknya tetap dijalankan meski sudah mengikuti vaksinasi. Agar tidak berakibat, lanjutnya seperti di India. Bahkan kini Malaysia dan Singapura memperketat protokol kesehatannya.

"Jika dilaksanakan dalam kelompok kecil di tempat terbuka, Salat Idul Fitri tetap dilaksanakan dengan ketentuan dengan shaf berjarak, menggunakan masker, tidak dalam kelompok besar. Atau lakukan dalam kelompok kecil dengan pembatasan jumlah jamaah yang hadir,"

tandasnya.

Menurut Agus, semua pihak harus selalu mematuhi protokol kesehatan terkait dengan pencegahan Covid-19. Bagi yang memilih melakukan kegiatan ibadah Ramadan dan Idul Fitri di rumah disebutnya tentu akan jauh lebih aman.

"Takbir Idul Fitri diutamakan dilakukan di rumah masing-masing. Boleh dilakukan di masjid atau musala dengan syarat tidak ada jemaah di sekitarnya yang terindikasi positif Covid-19. Juga dilakukan pembatasan jumlah orang dan tetap menerapkan protokol kesehatan secara disiplin," jelas Ketua MCCC.

Karenanya, jelas Agus, larangan mudik oleh pemerintah wajib didukung bersama-sama. Sebaliknya, kata Agus Samsudin diikuti dengan pengetahuan protokol kegiatan di wilayah publik. "Karena kalau libur hari raya ini tidak terkontrol akan berakibat tertundanya program mulai masuk sekolah di bulan Juni," tandasnya.

Tentu semua pihak sebut Agus, harus selalu mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dan bagi yang memilih melakukan kegiatan ibadah Ramadan dan Idul Fitri di rumah tentu akan jauh lebih aman. (Fsy)-d